☞ sambungan dari halaman 3

IMF adalah mengurusi krisis hutang internasional yang mulai bermunculan di berbagai negara peminjam. Sebagaimana hutang di negara-negara Dunia Ketiga membengkak dan tampaknya akan tak terbayar, sesuatu yang akan membuat sistem ekonomi internasional tersebut kembali kolaps, baik IMF maupun Bank Dunia mulai menawarkan pinjaman baru dengan syarat negara-negara penghutang tersebut setuju dengan program-program struk-tural di bawah koordinasi korporasi-korporasi internasional yang mereka dukung. Program yang ditawarkan itu pada intinya untuk "mempermurah ongkos produksi bagi korporasi-korporasi internasional" tersebut (David Ranney, *The Evoluting Supra-National Policy Arena*, University of Illinois Chicago 1993, hlm 24) dengan cara:

- Mereduksi pengeluaran pemerintah, untuk mengontrol inflasi dan mereduksi tuntutan aliran kapital dari luar, sebuah langkah yang dalam prakteknya diterjemahkan ke dalam pemotongan pengeluaran di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan;
- Pemotongan upah atau menekan kenaikannya dengan keras demi mereduksi inflasi dan membuat ekspor lebih kompetitif;
- Liberalisasi impor untuk membuat industri lokal lebih efisien dan memberlakukan insentif bagi produksi yang berwawasan pasar ekspor, yang dapat dilihat baik sebagai sebuah sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh pasar luar negeri dan juga sebuah sumber daya pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis daripada sekedar pasar lokal;
- Menghilangkan batasan-batasan investasi luar negeri dalam bidang industri dan layanan finansial untuk membuat produksi lokal dan layanan pengantarannya lebih efisien, atas kehadiran kompetitor dari luar negeri;
- Menurunkan nilai suku bunga lokal yang berbanding dengan dolar demi membuat ekspor lebih kompetitif; dan
- Memprivatisasi perusahaan-perusahaan milik negara dan memulai penghapusan aturan-aturan secara radikal demi mempromosikan alokasi sumber-sumber daya sesuai aturan pasar bukan lagi oleh aturan pemerintah. (Walden Bello, *Dark Victory*, Oakland, Calif. Food First 1994, hlm 27)

Kebanyakan pemerintah negara-negara Dunia Ketiga tak mempunyai pilihan lain kecuali menerima setiap syarat yang diajukan demi mendapatkan kucuran hutang baru, termasuk Indonesia, di mana pada bulan Januari 1998 Suharto menandatangani perjanjian dengan IMF. Siapapun yang duduk dalam jajaran pemerintahan—entah ia dipilih secara demokratis atau tidak—selama negara masih terjerat dalam lilitan hutang, maka ia harus mengikuti aturan dan perjanjian ekonomi yang telah disepakati sebelumnya.

Pemerintahan Global Baru—Trinitas Suci Baru

Globalisasi telah sejak awal membawa kontradiksi-kontradiksinya sendiri yang ditandai oleh konsep negara-bangsa yang dicetuskan oleh Ernest Renan tahun 1890-an. Bahkan negara kesejahteraan nasional yang demokratis dan teratur pun tak pernah menyentuh realitas bahwa ada saling keterkaitan antar setiap negara, yang artinya tak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri tanpa jalinan ekonomi dengan negara lainnya. Teori-teori nasionalis juga tidak menyentuh realita bahwa dunia tidaklah merupakan sekedar sekumpulan orang-orang yang hidup terpisah dengan orang lainnya dan bahwa sesungguhnya yang ada sejak awal adalah negara yang kuat mendominasi yang lemah—setiap negara terlalu bergantung pada negara lain, termasuk negara-negara adidaya, untuk dapat benar-benar menentukan apa yang harus berlaku di daerahnya masing-masing. Pasar dan bisnis beroperasi secara inter-nasional dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan "negara mereka" beserta seluruh rakyatnya.

Pemerintahan-pemerintahan nasional telah memberikan kekuatannya pada "Trinitas Suci Baru"—IMF, Bank Dunia dan GATT/WTO. Agensi-agensi ini semakin menentukan semua aturan yang harus diberlakukan dalam setiap negara, tentang bagaimana mereka akan beroperasi dan berkooperasi demi tujuan yang satu: Agenda Korporasi.

Tapi justru tidak melenyapkan pemerintah-pemerintah nasional, sistem ekonomi global baru ini membutuhkan pemerintah nasional atau/dan bahkan juga lokal untuk menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi nasional/lokal masing-masing demi meningkatkan efektifitas kerja sistem ekonomi global itu sendiri.

Sebagaimana negara-negara di era pra-modern Eropa yang menandai semakin berkuasanya kelas kapitalis nasional, sistem ekonomi global ini melayani sekaligus didukung oleh semakin maraknya korporasi-korporasi multinasional/ transnasional (MNC/TNC). Sebagaimana juga kekuasaan monarki, Trinitas Suci Baru tersebut juga paham bahwa mereka hanya akan dapat terus berkuasa apabila membangun aliansi dengan kelas penguasa di setiap inchi daerah di mana mereka beroperasi. Tetapi fungsi mereka justru lebih sedikit dibandingkan dengan fungsi pemerintahan konvensional—berhubung peran mereka yang nyaris tak nampak—yaitu hanya berfungsi dan tunduk pada Agenda Korporasi. Apabila dahulu raja adalah pengejawantahan Tuhan di atas bumi, maka kini tuhan-nya adalah Agenda Korporasi itu sendiri. Suka atau tidak, diakui atau tidak, hidup kita dan hidup anak-anak kita kini ada di bawah kekua-saannya.

* * *

reportase kronologis

KASUS TANAH RUMPIN, BOGOR

Tanah Rumpin adalah lahan pertanian yang produktif. Tanah yang telah dikelola oleh warga Sukamulya secara turun-temurun ini memiliki sejarah kepemilikan yang panjang semenjak penjajahan Belanda hingga Jepang. Semenjak tahun 1955–1956 tanah ini diklaim sebagai milik TNI AU. Pada tahun 1976, BPN Bogor memberikan status Girik pada tanah tersebut, namun warga belum mampu merubahnya menjadi Surat Hak Milik (Sertifikat). Pada tahun 1991 TNI AU membuat pernyataan bahwa mereka adalah pemilik tanah seluas 1000 Ha tersebut. Sampai pada akhirnya tahun 2006 aksi pengklaiman kembali dilancarkan oleh pihak TNI AU.

8 September 2005 | TNI AU mendatangi tanah kavling warga lalu merusak patok batas tanah dan memasang plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (SP KSAP) No. 23/P/KSAP/50. Oktober 2006, TNI AU yang diwakili oleh Kol. Dery Pemba Syafar mulai membujuk warga melalui Ketua RT setempat, H. Amir, agar menjual tanah mereka yang berada di blok Cisauk Persil 20 seluas 10 Ha seharga Rp 7000/meter. Saat itu warga tetap menolak untuk menjualnya. Namun menurut pihak TNI AU, tanah tersebut adalah bagian dari tanah 1000 Ha yang diklaim sebagai milik mereka berdasarkan SP SKAP No. 23/P/KSAP/50 dan Surat Keputusan Bupati Bogor: 591/194/ Kpts/Huk/2003.

8 November 2006 | TNI AU dilengkapi senjata laras panjang mulai menduduki lokasi persawahan milik warga. Dengan membawa Beko dan alat berat lainnya, mereka mulai menggali lahan persawahan yang terbilang masih sangat produktif tersebut. Aksi tersebut memancing reaksi warga.

9 November 2006 | Sekitar 250 warga melakukan demonstrasi di lokasi penggalian. Aksi warga disaksikan oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Camat, Koramil dan Kapolsek. Dalam aksinya, warga meminta TNI AU untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Tetapi demontrasi warga tidak berlangsung lama karena helikopter milik TNI AU yang sengaja terbang rendah memaksa mereka untuk bubar.

10 Desember 2006 | Lima hari setelah melakukan unjuk rasa ke DPRD Bogor, warga kembali melakukan aksi demonstrasi di jalan raya Cisauk-Cicangkal. Setelah itu mereka mendatangi lokasi persawahan yang digali TNI AU. Areal yang digali tersebut luasnya mencapai 2 Ha dengan kedalaman 2 meter. Keesokan harinya pada tanggal 11, diadakan pertemuan antara warga desa Sukamulya dengan Komisi A DPRD Kab. Bogor. Warga meminta TNI AU untuk segera mengehentikan penggalian areal persawahan milik warga, namun pihak TNI AU bersikeras akan terus melakukan penggalian sampai ada perintah untuk menghentikan penggalian tersebut dari Komandan Pusat (Dephan dan KASAU). Semenjak itu sering terjadi intimidasi yang dilakukan oleh TNI AU dan penjagaan yang ketat lengkap dengan senjata laras panjang di sekitar lokasi.

14 Desember 2006 | Beberapa perwakilan warga mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dan mengadukan tanah mereka yang direbut serta diklaim oleh TNI AU. BPN Pusat berjanji akan mendatangi BPN Bogor dan meninjau lokasi.

23 Desember 2006 | Warga kembali berunjuk rasa. Kali ini mereka menutup akses jalan menuju lokasi yang diduduki TNI AU. Setelah itu warga bergerak menuju Balai Desa dan lokasi persawahan yang sedang digali oleh TNI AU.

24 Desember 2006 | TNI AU menurunkan Beko ke sawah-sawah milik warga untuk membuat galian baru, dikawal oleh tentara bersenjatakan laras panjang. Menyaksikan hal itu, warga yang kebanyakan ibu-ibu turun ke sawah untuk menghalau Beko, sambil menangis dan bertelanjang bulat. Mereka mulai mengamuk dan memukuli sopir Beko termasuk pasukan yang sedang mengawalnya. Juru foto TNI AU yang ada di lokasi hanya mengambil gambar warga yang sedang mengamuk, tetapi tidak pada Beko yang sedang merusak sawah warga. Sekitar pukul 17.00 warga yang melihat mobil Polisi di sekitar lokasi segera melapor, tetapi Polisi dari Polres dan Polsek tersebut tidak bereaksi.

27 Desember 2006 | Perwakilan dari Desa Sukamulya sebanyak 24 orang mendatangi KomnasHam untuk memberikan pengaduan yang intinya menuntut agar perampasan serta penggalian yang dilakukan oleh TNI AU atas tanah dan sawah yang telah dimiliki petani (warga) dan dikelola secara turun temurun tersebut segera dihentikan. Mereka juga menuntut supaya alat-alat berat yang telah dipakai untuk menggali sawah warga tersebut digunakan lagi untuk meratakan tanah kembali ke keadaan semula, penarikan secepatnya pasukan TNI AU dari Desa Sukamulya dan proses hukum bagi TNI AU atas perampasan tanah, serta pencabutan pernyataan yang mengklaim tanah seluas 1000 Ha sebagai milik mereka. Namun, aksi warga tidak hanya berhenti sampai disitu.

22 Januari 2007 | Klimaks dari rentetan aksi protes yang dilancarkan warga, berujung dengan pembubaran, penembakan, penyiksaan, dan penculikan warga oleh anggota TNI AU. Pasca tragedi tersebut, anggota TNI AU melakukan sweeping ke rumah-rumah warga untuk mencari orang-orang yang dituduh sebagai provokator. Beberapa orang yang diculik, diiterogasi, dan disiksa kemudian diserahkan ke Polsek Rumpin tanpa tuduhan yang jelas.

JURNAL APOKALIPS
PO Box 1419, Bandung 40014
email: tim.apokalips@gmail.com

TIM REDAKSI: Sumadikarta, Makhdum Ibrahim, Rikki Rikardo, Bambang Sutedjo, Munaa, Petrus Sumitro, Ari Wibowo, Ahmad Kosasih

Jurnal Apokalips diterbitkan berkala sebagai bagian dari agenda Kampanye Komunitas Melawan Neoliberalisme. Kampanye ini terlaksana atas inisiatif dari komunitas-komunitas independen sebagai ikhtiar melawan gelombang imperialisme gaya baru yang semakin hari semakin nyata dan terasa dampaknya. Sesuatu yang membuat nyaris segala sesuatu dilabeli harga tetapi semakin sedikit yang diberi arti. Gerai-gerai produk semakin bertebaran di mana pun, tetapi di mana pun juga semakin sedikit yang mampu mengaksesnya. Hidup jadi tak lebih dari sekedar menjadi urusan makan, minum, berkembang biak atau urusan tempat tinggal dan dekorasinya; menjadi urusan konsumsi tapi tidak urusan kreasi. Hidup telah kehilangan artinya. Kami hanya menginginkan hidup kembali menjadi layak untuk dijalani, di mana segala sesuatu diberi arti bukan lagi label harga, sebagaimana kami ingin membangun kembali kerajaan surga di atas puing-puing neraka bumi bersama kalian semua, hingga suatu masa, hidup akan berkembang kembali di hadapan kita seperti mawar di awal musim panas.

NEWSLETTER PERIODIKAL 2 BULANAN | NOMOR 05 - MARET 2007

JURNAL APOKALIPS

GRATIS SEPERTI CIUMAN PERTAMA

Dalam dunia saat ini, mata kita hanya mengenali apapun sebagai produk dan melihat harga yang tertera di atasnya.

EDITORIAL Indonesia dilanda krisis finansial dahsyat yang berlanjut hingga kini semenjak tahun 1997—yang sesungguhnya adalah akibat merosotnya nilai rupiah yang disebabkan karena para pengusaha bank swasta Indonesia tak mampu mengembalikan hutang-hutang mereka yang pada tahun tersebut telah jatuh tempo—membuat Suharto pada bulan Januari 1998 menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) dengan Managing Director IMF, Michael Camdessus. Dan sejak itu jugalah, maka Indonesia mulai mengoperasikan apapun yang dikatakan IMF atas nama restrukturisasi Indonesia (i.e. pemotongan subsidi publik, pembukaan keran impor, privatisasi, dll.). Tapi toh ketergantungan pada konsep ekonomi tipe ini bukanlah pertama kalinya, dan apa yang terjadi sekarang hanyalah sebuah konsekuensi logis dari apa yang terjadi sebelumnya. Pra-IMF, pemerintah Indonesia bukanlah Suharto, melainkan korporasi bankir Warburg & Co., Lehman Brothers dan Lazard Freres—tiga serangkai yang memprakarsai pembentukan IGGI (InterGovernmental Group on Indonesia) atau grup intra-pemerintah yang tentunya memerintah Indonesia. Suharto hanyalah alat. Dan ia dibuang saat gaya-gaya bermainnya dianggap kuno dan tak efektif lagi. Pasca lengsernya sang diktator, kursi pemerintahan silih berganti diisi oleh berbagai kandidat dari berbagai partai politik yang menawarkan berbagai gaya main baru, tapi toh semuanya hanyalah alat di tengah lapangan permainan yang sama. Konsep ekonomi, cengkeraman hutang, semuanya tetap mengarah pada satu hal yang sama; dari COMECON di era Sukarno, hingga IGGI di era Suharto, hingga kini pasca-IMF dan terlibatnya ADB yang entah sampai kapan, dan kesemuanya menegaskan hal yang sama, bahwa semua pemerintah hanyalah alat yang mengabdi pada satu tuhan: Agenda Korporasi.

Ilusi Pelunasan Hutang IMF

Kunjungan Managing Director IMF

Secara formal Indonesia telah lepas dari hutangnya terhadap IMF, namun bukan berarti Indonesia tidak lagi berhubungan dengan agenda pembangunan yang dicetuskan IMF. 24 Januari 2007, Managing Director IMF, Rodrigo de Rato datang ke Jakarta. Kedatangan Rato ini adalah kedatangan pertama kalinya pejabat teras IMF ke Jakarta sejak pelunasan hutang Indonesia sebesar US$ 7,5 Milliar pada Oktober 2006. Kedatangan Rato disambut berbagai spekulasi tentang maksud kunjungannya kali ini, terutama agenda apa yang hendak dibicarakannya bersama SBY. Selama keberadaannya di Indonesia, beberapa LSM berunjuk rasa di depan gedung perwakilan IMF di kompleks gedung Bank Indonesia, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa membawa poster-poster yang bertuliskan "*Build a new world without IMF*", "*Lawan penjajahan gaya baru: neoliberalisme*", "*IMF OUT*", dan poster lain yang intinya menolak upaya intervensi IMF atas Indonesia. Unjuk rasa ini berkaitan dengan prediksi adanya agenda tersembunyi yang dibawa Rato ke Jakarta. Berbagai pihak menyatakan kekhawatirannya jika Indonesia kembali melakukan pinjaman kepada IMF.

Terkait kedatangan Rato ke Jakarta, beberapa pejabat di pemerintahan termasuk SBY memberikan pernyataannya. "Kunjungan Managing Director IMF Rodrigo de Rato ke Indonesia, janganlah diartikan bahwa IMF akan menawarkan kembali bantuan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kita tidak berpikir atau merencanakan untuk berutang lagi pada IMF," kata SBY kepada wartawan seusai menerima Rato. Sedangkan Menko Perekonomian Boediono menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat tidak akan mengajukan proposal pinjaman hutang lagi kepada IMF. "Tidak ada rencana atau keperluan untuk itu, kita baru saja membayar kembali. Di sini pun tidak dibahas, dan tidak ada dalam rencana pemerintah untuk itu. Ini adalah kunjungan kehormatan yang tidak ada agenda khusus. Intinya adalah bertemu untuk bertukar pikiran dan bertukar informasi menyangkut beberapa hal," kata Boediono. Secara keseluruhan pejabat pemerintah dalam pernyataannya menegaskan bahwa kunjungan Rato sama sekali tidak membawa agenda pemberian hutang baru. Walaupun begitu, tetap ada agenda yang berkaitan dengan pemberlakuan liberalisasi ekonomi di Indonesia. Untuk hal ini, IMF masih mempunyai tanggung jawab menuntaskan tujuan finalnya melakukan liberalisasi ekonomi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Apalagi Boediono sendiri pernah memberikan pernyataan bahwa pemerintah masih akan mendengar saran dan menerima bantuan teknis terkait kebijakan perekonomian dari IMF.

Selain pujian-pujian yang diutarakan Rodrigo de Rato kepada pemerintah atas keberhasilan menjalankan program IMF di Indonesia, dalam pertemuan itu pula dibicarakan beberapa hal terkait situasi Indonesia lainnya. Salah satunya ialah program yang dijalankan program IMF di Indonesia sejak tahun 2003 sampai sekarang. Seperti yang diterangkan oleh SBY kepada Rato, yaitu masalah *triple track strategy*, atau strategi tiga jalur yakni stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan juga peningkatan lapangan kerja. Serta masalah mengenai peran dari UKM dan pertanian yang sangat penting di dalam strategi pembangunan Indonesia.

Berkaitan dengan program kemiskinan, nampaknya pemerintah Indonesia belum mampu menjalankan program pengurangan kemiskinan secara signifikan. Karena data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada 2004 persentase kemiskinan di Indonesia sekitar 16,7% atau sekitar 36 juta jiwa dengan rata-rata pendapatan perbulan sekitar Rp.122.775. Walaupun tahun 2000 persentase kemiskinan di Indonesia mencapai 20.0 sehingga tahun 2004 menunjukkan penurunan, namun tahun 2006 diperkirakan mengalami kenaikkan sekitar 0,6%. Indikasi naiknya kemiskinan bisa terlihat sekarang ini terutama jika dikaitkan dengan menurunnya daya beli masyarakat. Meningkatnya urbanisasi ikut memberi andil pada naiknya angka kemiskinan. Pemerataan pembangunan dalam kenyataannya tidak berlaku demikian, karena dalam era otonomi ini perputaran uang di Indonesia sekitar 60% masih berada di pulau Jawa, sedangkan daerah masih tetap tertinggal.

Kemudian yang mesti diperhatikan pada pertemuan itu ialah dibicarakannya masalah energi di Indonesia. Dalam pernyataannya Boediono menerangkan bahwa yang dibahas ialah kebijakan pengelolaan energi Indonesia berkaitan program diversifikasi energi yang sedang dijalankan. Lalu pembahasan kondisi pengelolaan energi Indonesia serta hubungannya dengan kondisi energi dunia pada umumnya. Hal ini tentu saja sangat penting untuk dibicarakan terutama erat kaitannya dengan Indonesia yang didorong untuk menjadi negara pengekspor minyak terbesar dan pengintegrasian sistem pengelolaan energi pada sistem global. Perlu diketahui bahwa kuota ekspor energi minyak dan gas Indonesia tahun 2006 paling besar jumlahnya selama kurun waktu 60 tahun, atau sejak negara ini merdeka. Naiknya kuota ekspor ini malah berimbas pada naiknya harga BBM di dalam negeri.

Masalah global ikut dibahas dalam pertemuan itu, yakni menyangkut masalah perkembangan ekonomi 2007, bagaimana peran Amerika, Eropa, Jepang, China dan termasuk masalah seperti *global warming*, dan lain lain. "Mengenai bidang regional, isu yang dibahas antara lain integrasi keuangan di kawasan ini, masalah gerakan modal yang ada plus minusnya, ada masalah ada benefitnya, juga masalah China, mengenai peranan China dalam masalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di kawasan ini, maupun dikawasan global termasuk mengenai masalah-masalah fleksibilitas, mengenai *exchange rate* atau sistem kurs itu pengaruhnya. Itu adalah poin-poin yang menjadi pembicaraan Presiden SBY dan De Rato," papar Boediono.

➲ Siapkan dirimu! May Day 2007, klik: http//m1-2007.blogdrive.com

Hal menarik lainnya yang dibahas dalam pertemuan itu ialah mengenai permasalah internal IMF sendiri. Berkaitan dengan hal itu pula Indonesia meminta untuk berperan lebih besar dalam menentukan skema ekonomi regional di Asia. SBY menyampaikan pandangan Indonesia yang menginginkan bahwa dalam kuota suara di IMF agar Indonesia bisa lebih besar lagi sehingga representasinya cukup signifikan, terutama perhatian ekonomi di wilayah Asia.

Kondisi IMF sendiri sekarang ini tengah dibelit masalah serius. Seperti yang dikatakan oleh juru bicara KAU (Koalisi Anti Utang), Kusfiardi. Hal itu disebabkan seperti memburuknya potensi pendapatan akibat percepatan pelunasan utang yang telah dilakukan beberapa negara seperti Indonesia, Serbia, dan Uruguay. Kusfiardi menambahkan, IMF juga menghadapi proyeksi kerugian operasional sebesar US$87,5 juta dan US$280 juta pada 2009. Di tahun fiskal 2007 yang akan berakhir pada 30 April 2007, IMF akan mengalami defisit sebesar US$ 105 juta. Defisit tersebut telah melebar dari proyeksi awal, yakni US$ 90 juta

Dengan lunasnya utang Indonesia pada IMF sebesar US$ 7,5 milliar, SBY menegaskan pula sejak 2007 ini Indonesia tak memerlukan forum CGI (Consultative Group on Indonesia). Dalam pernyataannya pada wartawan, SBY ingin mengakhiri itu dan memulai babak baru dalam pembangunan Indonesia, yakni dengan merancang pembangunan dengan lebih bertanggung jawab. Kalaupun harus berhutang, SBY ingin itu dilakukan dalam konteks *G to G* (Government to Government) antar negara, bukan melalui forum semacam CGI atau IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia).

Hutang Indonesia Lainnya

Akan tetapi lunasnya hutang IMF bukan berarti Indonesia terbebas dari hutang yang sangat besar. Apalagi jika percaya dengan pernyataan SBY mengenai niatannya untuk memulai pembangunan tanpa mengandalkan hutang nampaknya merupakan suatu yang nihil untuk Indonesia. Minimal lima tahun ke depan Indonesia akan terus terbelit hutang. Menurut data Bappenas 2006, utang negara sudah mencapai US$ 130 miliar, terdiri atas utang luar negeri US$ 67,9 miliar dan utang domestik Rp.658 triliun. Setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri yang jatuh tempo Rp.96 triliun, ditambah beban utang dalam negeri Rp.60 triliun, sehingga setiap tahun Indonesia harus membayar utang Rp.150 triliun sampai dengan Rp.170 triliun.

Dalam editorial Media Indonesia (1/2), memberitakan bahwa selepas pelunasan hutang pada IMF, beberapa departemen merencanakan hutang baru kepada kreditor luar negeri sebanyak US$ 40 miliar dalam tempo dua tahun ke depan sampai dengan 2009. Dari jumlah itu sebagian besar datang dari rencana Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Pinjaman US$40 miliar dalam tempo dua tahun adalah angka yang fantastis. Ketika masih berada dalam formula CGI, kebutuhan pinjaman Indonesia sejak reformasi rata-rata US$ 3 miliar. Artinya dalam tempo dua tahun CGI hanya mengucurkan sekitar US$ 6 miliar. Berbeda dengan data Bappenas, Media Indonesia menuliskan bahwa hutang luar negeri Indonesia telah mencapai US$ 1000 triliun lebih. Dalam APBN 2007, alokasi dana yang harus dipakai untuk membayar hutang termasuk bunga tidak kurang dari Rp.200 triliun, atau sepertiga APBN yang Rp.600 triliun lebih itu.

Salah satu lembaga keuangan internasional lainnya yang menjadi pemberi hutang terbesar pada Indonesia ialah ADB (Asian Development Bank) dan Indonesia tercatat selama 7 tahun terakhir ini Indonesia sebagai negara penghutang terbesarnya. Kurun waktu 1999-2005 saja hutang Indonesia pada ADB telah mencapai US$ 20,7 milliar atau sekitar Rp.186,3 triliun, dan belum termasuk bantuan teknis sebesar US$.240,449 juta, dari jumlah itu utang yang belum dibayar sebesar US$ 11 miliar atau sekitar Rp.99 triliun. Pada 2005, Indonesia pernah melunasi sebagian kecil pinjamannya, namun tahun itu pula Indonesia meminjam sekitar US$ 1,15 miliar termasuk US$ 350 juta pinjaman sektor swasta diluar jaminan pemerintah. Pinjaman 2005 itu termasuk di dalamnya dengan biaya pembangunan kembali Aceh dan Nias sebesar US$ 290 juta, dan belum termasuk US$ 10 juta yang dipinjam untuk khusus mendanai perbaikan sarana air bersih dan sanitasi. Sedangkan pinjaman untuk pemerintah sendiri sebesar US$ 300 juta, dan ADB melalui ADF *(Asian Development Fund)* ikut memberi pinjaman lagi sebesar US$ 30 juta. Kemudian untuk pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya anggaran untuk desa dan wilayah tertinggal, ADB meminjamkan dana sebesar US$ 250 juta.

Sebulan setelah pelunasan hutang IMF, November 2006 dalam pertemuan di Manila, ADB memutuskan akan memberi pinjaman kepada Indonesia sebesar US$428 juta. Jumlah ini jauh lebih besar ketimbang yang tercantum dalam rencana bantuan program untuk Indonesia di awal 2006 yang hanya sebesar US$ 47,6 juta. Tahun 2006 bisa jadi Indonesia kembali memecahkan rekor negara peminjam terbesar ADB, karena pada pertengahan Desember 2006, Indonesia telah meminjam sekitar US$ 50 juta untuk perbaikan pendidikan di pesantren. Pinjaman ini adalah tahap awal dana yang dianggarkan oleh Departemen Agama dari jumlah keseluruhannya mencapai US$ 71,4 juta yang akan dipenuhi sampai 2012.

Untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Indonesia memproyeksikan dana sebesar US$ 65 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Dari jumlah tersebut, US$ 25 milliar akan dibayar oleh pemerintah, US$14 miliar oleh bank domestik, asuransi, dan lembaga keuangan domestik lainnya, US$10 juta oleh rekanan pemerintah, dan US$16 miliar oleh sektor swasta. Untuk awal 2007 saja pemerintah akan mendapatkan pinjaman hutang dari Bank Dunia sebesar US$ 20 juta untuk perbaikan jalan nasional di daerah Pantura Jawa.

Dari jumlah hutang baru Indonesia yang sangat fantastis itu mengindikasikan bahwa pemerintah masih bernafsu untuk meminjam hutang dari luar, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ketika masih dalam formulasi CGI, penyaluran dana pinjaman diawasi secara ketat disertai audit keuangan nasional yang terbuka. Namun dengan pinjaman hutang baru ini pemerintah bisa jadi menghindar dari pengawasan ketat debitor. Hal ini pula menunjukkan bahwa lunasnya hutang IMF dan keluarnya Indonesia dari CGI, Pemerintahan SBY-JK tidak mengalami kemajuan apapun, selain hanya meningkatkan kepandaian mengalihkan hutang dari satu lembaga keuangan internasional ke lembaga keuangan internasional lainnya.

* * *

MONSTER IMF

(Bagian ke-2 dari "Trinitas-Suci"IMF, Bank Dunia dan WTO)

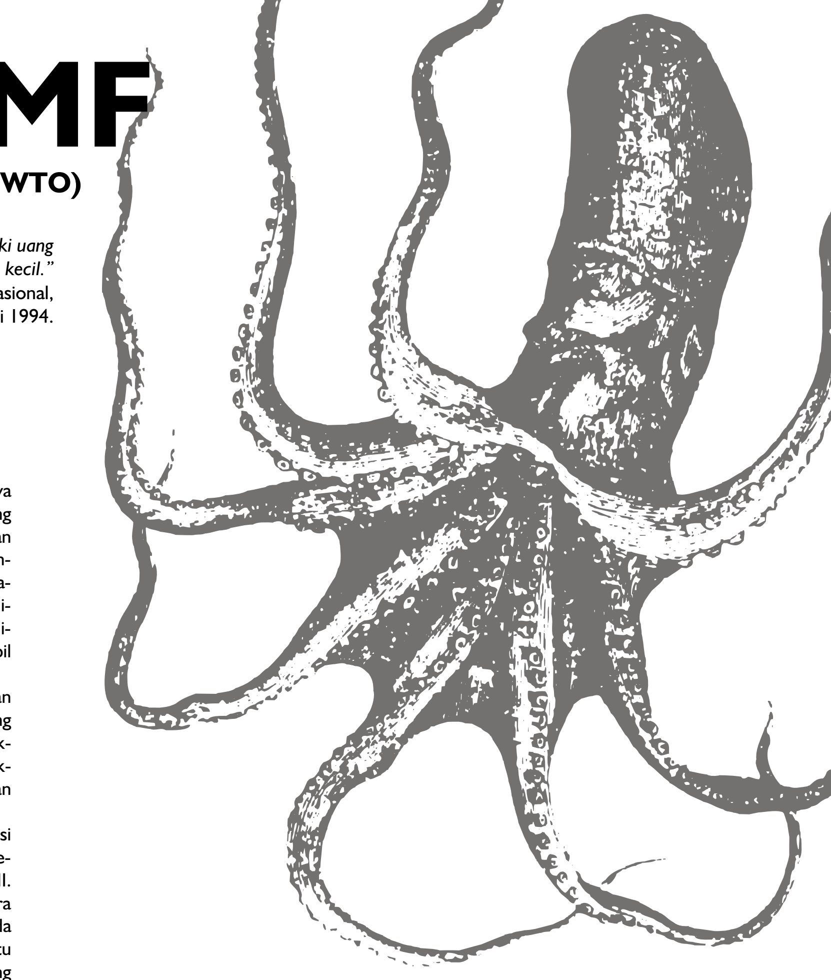

"Kini beberapa individu pialang saham memiliki uang sebanyak yang dimiliki beberapa negara kecil."
—Judy Shelton, ahli sistem ekonomi moneter internasional, sebagaimana yang dikutip dalam The New York Times, 8 Mei 1994.

Latar Belakang

Secara umum telah diketahui bahwa ekonomi kapitalis ditandai dengan ketidakmampuannya yang kronis dalam melestarikan sumber daya manusia termasuk material bahan bakunya—yang termanifestasikan dalam keberadaan (serta peningkatan) kaum miskin, pengangguran, resesi dan depresi ekonomi. Sekali saja ekonomi berhenti berkembang, ia akan terjebak dalam jurang kemandegan yang berujung pada kolapsnya sistem secara keseluruhan. Untuk menghindari hal ini, berbagai kebijakan ekonomi diberlakukan dan diuji-cobakan. Krisis bank di abad ke-19 diatasi dengan dikembangkannya bank sentral untuk mengontrol uang dan kredit. Sementara krisis terparah yang dikenal dengan "Depresi Besar" tahun 1930-an direspon dengan kebijakan Keynesian—yang diambil dari nama ekonom Inggris, John Maynard Keynes.

Keynes berargumen bahwa kurangnya perkembangan ekonomi adalah hasil dari ketimpangan ekonomi: pengangguran atau pekerja yang diupah rendah tidak mampu membeli kembali apa yang telah diproduksi. Kebijakan Keynesian menstimulasi tuntutan ekonomi dengan mendorong kenaikan upah, memperbesar kredit serta program-program kesejahteraan (seperti perhatian pada hak-hak buruh, standardisasi upah minimum, pensubsidian kebutuhan pokok, pembukaan lapangan kerja baru, pembangunan infrastruktur publik, dll.).

Tetapi pada kenyataannya, sistem ekonomi tersebut tidak mampu menanggulangi Depresi Besar tersebut semenjak ekonomi suatu negeri tak pernah dapat terlepas dari negeri lainnya, sehingga dibutuhkan sebuah "intervensi pemerintah" dalam skala besar—katakanlah Perang Dunia II. Hal ini mengarah pada ide untuk diberlakukannya kapitalisme yang diregulasi oleh negara-negara bangsa, sesuatu yang lantas dikenal dengan sistem: *regulated capitalism*. Ide ini hadir karena ada kecemasan bahwa pasar dunia yang tak diregulasi akan mengarah pada Depresi Besar lagi—sesuatu yang akan mengarah pada pemiskinan besar-besaran, radikalisme popular atau bahkan juga Perang Dunia.

Kapitalisme yang diregulasi ini memang tak menyentuh problem 'abadi' dari sistem kapitalisme sendiri–seperti distribusi kemakmuran yang tak merata, penghancuran alam, ketidak-pedulian pada kebutuhan dan tujuan non-pasar—tetapi ia setidaknya memperbaiki angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Atas kecemasan tersebutlah maka negara-negara kapitalis besar yang memberlakukan kapitalisme yang diregulasi ini pada tahun 1944 menginisiasikan pertemuan yang menghasilkan Persetujuan Bretton Wood, yang memapankan institusi-institusi untuk meregulasi ekonomi internasional. Persetujuan ini didasarkan pada hegemoni global Amerika Serikat (AS)—yang mana pada tahun 1950, AS telah menguasai 40% produksi dunia sekaligus kekuatan militer, politik dan bahkan juga "kebenaran". Salah satu institusi yang dilahirkan tersebut salah satunya adalah IMF (*International Monetary Fund*)—di samping PBB, GATT (*General Agreement of Tarrifs and Trade*, yang selanjutnya akan berevolusi menjadi WTO) dan Bank Dunia (*World Bank*).

Dinamika IMF

Persetujuan Bretton Woods memapankan Bank Dunia untuk membantu pembangunan kembali Eropa pasca PD II, sementara IMF mengurusi soalan nilai suku bunga yang mapan. Tetapi dari waktu ke waktu peran mereka seringkali berubah drastis. Dimulai tahun 1950-an Bank Dunia menjadi lembaga donor utama yang meminjamkan uang bagi proyek-proyek pengembangan di negara-negara Dunia Ketiga. Pasca 1972, nilai suku bunga yang mapan dihapuskan sehingga tugas

bersambung ke halaman 4 ☞

Bedah Kejahatan Korporasi

Dahaga di Atas Mata Air

" Used to be free
Now it cost you a fee
'cause it's all about
getting that cash money"
– Mos Def, New World Water

Siapa yang tidak kenal dengan merk dagang **Aqua**? Sangking terkenalnya, nama Aqua kini telah menjadi semacam nama generik dari produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) serupa di Indonesia. Coba perhatikan sekitar kita, berapa banyak orang yang kita temui menyebut nama Aqua saat mereka hendak membeli AMDK di warung atau toko? Dan perhatikan juga, jarang sekali ada pembeli yang protes saat mereka diberi VIT, RON 88 atau ADES oleh si penjual walaupun sebelumnya mereka meminta *"Beli Aqua satu.."*

Hal itu mungkin sekali terjadi karena Aqua adalah pelopor bisnis AMDK dan menjadi produsen AMDK terbesar di Indonesia. Bahkan pangsa pasarnya sendiri saat ini sudah meliputi Singapura, Malaysia, Fiji, Australia, Timur Tengah dan Afrika. Di Indonesia sendiri mereka menguasai 80 persen penjualan AMDK dalam kemasan galon. Sedangkan untuk keseluruhan *market share* AMDK di Indonesia, Aqua menguasai 50% pasar. Saat ini Aqua memiliki 14 pabrik yang tersebar di Jawa dan Sumatra.

Produsen AMDK Aqua, PT. Golden Mississippi (kemudian bernama PT Aqua Golden Mississippi) yang bernaung di bawah PT. Tirta Investama (selanjutnya, dalam tulisan ini akan disebut sebagai Aqua saja, untuk mewakili korporasi produsen AMDK tersebut), didirikan pada 23 Februari 1973 oleh Tirto Utomo (1930-1994). Pabrik pertamanya didirikan di Bekasi. Sejak saat itu, orang Indonesia mulai mengubah salah satu kebiasaannya secara mendasar dengan membiasakan diri mengkonsumsi AMDK, membeli air.

Danone, sebuah korporasi multinasional asal Perancis, berambisi untuk memimpin pasar global lewat tiga bisnis intinya, yaitu: *dairy products*, AMDK dan biskuit. Untuk *dairy products*, kini Danone menempati posisi nomor satu di dunia dengan penguasaan pasar sebesar 15%. Adapun untuk produk AMDK, Danone juga mengklaim telah menempati peringkat pertama dunia lewat merek Evian, Volvic, dan Badoit. Untuk bisa mempertahankan diri sebagai produsen AMDK nomor satu dunia, Danone tentu saja harus berjuang keras menahan gempuran Coca-Cola dan Nestle.

Untuk menambah kekuatannya, Danone mulai memasuki pasar Asia, dan mengambil alih dua perusahaan AMDK di Cina. Menyadari kekuatan kecil Aqua yang belum terjamah oleh Coca-cola atau korporasi lainnya, Danone buru-buru mendekati Aqua. Akhirnya, pada tanggal 4 September 1998, Aqua secara resmi mengumumkan "penyatuan" kedua perusahaan tersebut dan bertepatan dengan pergantian milenium, pada tahun 2000 Aqua meluncurkan produk berlabel **Danone-Aqua**. Pada tahun 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT. Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Grup Aqua.

Tapi, pertanyaannya adalah, datang dari manakah air bersih yang dijual oleh Aqua sehingga sekarang manusia perlu membayar hanya untuk mendapatkan air bersih?

Kisah dari Sekitar Sumber Mata Air

Salah satu dari sekian banyak mata air yang dieksploitasi dan disedot habis-habisan oleh Aqua hingga hari ini adalah mata air Kubang yang terletak di kampung Kubang Jaya, desa Babakan Pari yang berada di kaki gunung Salak, Sukabumi bagian utara.

Sumber mata air di Kubang mulai dieksploitasi oleh Aqua sejak sekitar tahun 1992-an. Kawasan mata air Kubang yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian, kemudian oleh Aqua diubah menjadi kawasan seperti hutan yang tidak boleh digarap oleh warga setempat. Sekeliling kawasan mata air Kubang dipagari tembok oleh Aqua dan dijaga ketat oleh petugas keamanan sewaan selama 24 jam penuh setiap harinya. Tidak ada seorang pun yang boleh memasuki kawasan tersebut tanpa surat ijin yang ditandatangani langsung oleh pimpinan kantor pusat Aqua Grup di Jakarta.

Pada awalnya air yang dieksploitasi oleh Aqua adalah air permukaan, yaitu air yang keluar secara langsung dari mata air tanpa dibor. Namun pada tahun 1994, Aqua mulai mengeksploitasi air bawah tanah dengan cara menggali jalur air dengan mesin bor bertekanan tinggi.

Sejak air di mata air Kubang disedot secara besar-besaran oleh Aqua, banyak perubahan yang dirasakan oleh warga sekitar. Yang paling terasa adalah menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di desa, dan ini berdampak buruk pada kehidupan warga desa itu sendiri. Penurunan daya dukung air ini tampak dari mulai munculnya masalah-masalah terkait dengan pemanfaatan sumber daya air di tingkat komunitas sejak sumber mata air Kubang dikuasai oleh Aqua. Salah satu masalahnya adalah kurangnya ketersediaan air bersih untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari termasuk air untuk minum, memasak, mencuci, mandi dan lain-lain. Masalah ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan sumur-sumur milik warga yang menjadi sumber pemenuhan akan kebutuhan air bersih sehari-hari. Sekarang, tinggi muka air sumur milik kebanyakan warga maksimal hanya tinggal sejengkal saja atau sekitar 15 cm. Bahkan beberapa sumur sudah menjadi kering samasekali. Padahal sebelum Aqua menguasai air di sana, tinggi muka air sumur biasanya mencapai 1-2 meter. Dulu, hanya dengan menggali sumur sedalam 8-10 meter saja, kebutuhan air bersih untuk sehari-hari sudah sangat terpenuhi. Sekarang, warga perlu menggali sampai lebih dari 15-17 meter untuk mendapatkan air bersih. Dulu, warga tidak memerlukan mesin pompa untuk menyedot air untuk keluar dari tanah, sekarang dalam sekali sedot menggunakan mesin pompa, air hanya mampu mencukupi 1 bak air saja dan setelah itu sumurnya langsung kering. Bahkan pada beberapa kampung, apabila dalam sebulan saja hujan tidak turun, sumur menjadi kering sama sekali. Padahal dulu, saat musim kemarau memasuki bulan ke-6 pun tidak membuat air sumur menjadi kering.

Masalah lainnya lagi adalah, kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi pertanian. Masalah ini dialami oleh para petani dari hampir semua kampung di kawasan desa Babakan pari. Saat ini para petani di beberapa kampung tersebut saling berebut air karena ketersediaan air yang sangat kurang. Bahkan beberapa sawah tidak kebagian air dan mengandalkan air dari air hujan saja. Akibatnya, banyak sawah kekeringan pada musim kemarau dan tentu saja hal ini menimbulkan masalah perekonomian yang cukup serius bagi para petani.

Hal serupa juga terjadi di Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Aqua mengeksploitasi air secara besar-besaran dari tengah sumber mata air di Kabupaten Klaten sejak 2002. Sama dengan apa yang terjadi di desa Babakan Pari, mayoritas penduduk di daerah tersebut juga menopang kehidupannya dari pertanian. Karena debit air menurun sangat drastis sejak Aqua beroperasi di sana, sekarang para petani terpaksa harus menyewa pompa untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawahnya. Untuk kebutuhan sehari-hari, penduduk harus membeli air dari tangki air dengan harga mahal karena sumur-sumur mereka sudah mulai kering akibat "pompanisasi" besar-besaran yang dilakukan oleh Aqua. Hal ini sangat ironis mengingat Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya air. Di satu Kabupaten ini saja sudah terdapat 150-an mata air.

Aqua memiliki izin untuk mengambil air sebanyak 18 liter per detik melalui sumur bor di dekat mata air Sigedang, yang juga merupakan air sumber irigasi untuk lahan pertanian di lima kecamatan. Ironisnya, saat kurangnya air irigasi ini memicu konflik di antara petani itu sendiri dalam soal perebutan sumber air yang semakin mengering demi sawah-sawah mereka, Aqua malah mengajukan permintaan menaikkan debit dari 18 liter menjadi 60 liter per detik. Salah satu hal yang juga menjelaskan mengapa ide swasembada pangan semakin menjadi angan-angan belaka.

Hingga saat ini Grup Aqua memiliki 10 sumber mata air di: (1) Berastagi, Sumut, (2) Lampung (Jabung dan Umbul Cancau), (3) Mekarsari, Sukabumi (Kubang), (4) Subang (Cipondoh), (5) Wonosobo (Mangli), (6) Klaten (Sigedang), (7) Pandaan, Jatim, (8) Kebon Candi, Jatim, (9) Mambal, Bali dan (10) Menado (Airmadidi).

Hari ini, selain Aqua, terdapat 246 perusahaan AMDK yang beroperasi di Indonesia. Produksi AMDK amat boros air. Menurut catatan ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia), perusahaan AMDK di seluruh Indonesia setiap tahun membutuhkan sekitar 11,5 miliar liter air bersih, namun yang pada akhirnya menjadi produk AMDK hanya sebanyak 7,5 miliar liter per tahun. Sisanya, 4 miliar liter air bersih, terbuang percuma untuk proses pencucian dan pemurnian air.

Kejahatan yang Terlupakan di Balik Legalitas

Sama seperti sayur-sayuran, air yang merupakan sebuah produk alam, keluar dari muka bumi secara gratis dan tentu saja bukanlah "milik" siapapun. Sama seperti oksigen, seharusnya siapapun dapat mengakses air bersih. Apa yang terjadi di desa Babakan Pari dan Kabupaten Klaten tadi adalah contoh kecil bagaimana korporasi menguasai apa yang sudah seharusnya dapat diakses oleh semua orang, dan lalu menjualnya kembali kepada semua orang. Air bersih yang keluar dari muka bumi diklaim sebagai "milik" sebagian individu saja melalui jalur legal, disedot, disuling, dan dikemas oleh korporasi lalu ditenteng, dijajakan, diperiklankan, dan dijualbelikan kepada semua orang—karena semua orang membutuhkan air bersih.

Menurut penelitian, ketersediaan air tawar saat ini kurang dari 1,5% dari seluruh air di muka bumi. Saban dua dasawarsa, kebutuhan umat manusia akan air tawar meningkat dua kali lipat. Angka itu dua kali lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Apabila kecenderungan ini berlangsung terus, pada tahun 2025 permintaan akan air tawar diduga meningkat sebesar 56% melebihi yang tersedia saat ini. Kita dapat bayangkan sendiri apa yang akan terjadi apabila masa tersebut tiba sementara air bersih dikuasai oleh beberapa individu saja melalui korporasi-korporasinya.

Bagi sebagian orang, apa yang dilakukan oleh produsen AMDK seperti Aqua adalah sebuah bentuk "kejahatan legal". Legal, karena hukum dan masyarakat mengakui bahwa Aqua "berhak" atas air yang keluar dari muka bumi secara gratis untuk menjadi "milik" mereka, karena mereka lalu memproduksinya secara "legal" serta menperjualbelikannya, dan semua itu dilakukan di bawah lindungan hukum. Artinya tidak melanggar hukum. Tentu saja.

Namun, legalitas dan hukum adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, dan selalu ada kepentingan tertentu di balik apapun yang diciptakan manusia. Hukum memang diciptakan untuk melindungi kepentingan mereka yang mampu menciptakannya.

Dalam kebijakan neoliberalisme, pengambilalihan sumber daya air ini adalah hasil diterapkannya praktek privatisasi. Gagasan privatisasi terhadap sumber daya air ini diajukan terutama oleh Bank Dunia dan IMF, tentu saja dengan dukungan korporasi-korporasi multinasional di baliknya. Privatisasi sumber daya air di banyak negara dilakukan untuk memenuhi persyaratan IMF dan Bank Dunia ketika memberikan pinjaman kepada negara tersebut (lihat artikel "Monster IMF" di jurnal ini).

Saat ini "hanya" air, tanah, api, dan udara yang bersih, suatu ketika mungkin akan sampai satu masa di mana bahkan sinar mataharipun menjadi barang dagangan dan tak tersisa sedikitpun hasil dari bumi ini yang bisa kita rasakan manfaatnya tanpa mengeluarkan uang. Masalahnya, tidak semua orang memiliki uang yang cukup, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Dan ini semua tampak tidak seperti sebuah kejahatan, karena hukum melindungi dan melegalisir semua hal tersebut.

* * *